

ABSTRAK

PEMODELAN KOORDINASI *MULTISTAKEHOLDER* PADA LAYANAN *THREE IN ONE (3 IN 1)* DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENCATATAN SIPIL USIA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Vincensius Soma Ferrer

Penelitian ini menyoroti kebutuhan aktualisasi proses koordinasi *multistakeholder* pada sebuah layanan public yang dalam hal ini adalah pelayanan pencatatan sipil usia anak. Gagasan koordinasi *multistakeholder* dalam sebuah pelayanan publik muncul dari pengambilan salah satu intisari dari konsep *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus berada di Kota Bandar Lampung. Pelayanan publik berbasis koordinatif digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung sebagai inovasi dalam upaya optimalisasi pencatatan sipil untuk usia anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang koordinatif berhasil memberikan dampak yang baik terhadap kepemilikan administrasi kependudukan pada usia anak. Kritik bahwa konteks koordinasi pada layanan *Three in One* yang perlu diaktualisasi hadir setelah ditemukan masalah bahwa masih belumnya seluruh anak di Bandar Lampung memiliki dokumen administrasi kependudukan yang utuh yang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Koordinasi, Pencatatan Sipil, Anak

ABSTRACT

MULTISTAKEHOLDER COORDINATION MODELING IN THE THREE IN ONE (3 IN 1) SERVICE IN AN EFFORT TO OPTIMIZE THE CIVIL REGISTRATION OF CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG

By

Vincensius Soma Ferrer

This study highlights the need to actualize the multistakeholder coordination process in a public service, which in this case is a child civil registration service. The idea of multistakeholder coordination in a public service arises from taking one of the essences of the concept of collaborative governance. This research uses a quality approach with the locus located in Bandar Lampung City. Coordinative-based public services were initiated by the Bandar Lampung Population and Civil Registration Service as an innovation in an effort to optimize civil registration for children. The results of this study show that coordinative public service has succeeded in having a good impact on the ownership of population administration at the age of the child. Criticism that the coordination context on the Three in One service that needs to be actualized was present after the problem was found that there was still not all children in Bandar Lampung had complete population administration documents as regulated by the Law of the Republic of Indonesia.

Keywords: Public Service, Coordination, Civil Registration, Children